



Judul: **Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi**  
Tanggal Diterbitkan: **27 Juli 2021**

Pemilik Kebijakan: **Direktur Etika dan Kepatuhan**

Judul: **Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi**

Pemilik Kebijakan:

Judul: <b>Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi</b>	Pemilik Kebijakan: <b>Direktur Etika dan Kepatuhan</b>
Tanggal Diterbitkan: <b>27 Juli 2021</b>	Tanggal berlaku: <b>1 Agustus 2021</b>
Menggantikan:	<b>Kebijakan Anti-Korupsi Global</b> Kraft Heinz, Tanggal 1 Oktober 2015
	Kebijakan Antisuap Heinz CC.07 Tanggal: 11 Oktober 2011
	Kebijakan Melawan Korupsi dan Suap Kraft C-17 Tanggal: 1 Oktober 2012

kepatuhan terhadap Kebijakan, Arahan, dan semua undang-undang antikorupsi internasional yang berlaku.

Karena merupakan kebijakan global, kebijakan ini menggantikan kebijakan regional atau lokal apa pun, kecuali dalam kasus di mana undang-undang atau peraturan regional membahas konten tertentu yang harus atau tidak dapat dimasukkan oleh hukum. Setiap tambahan atau variasi dari Kebijakan Global ini harus disetujui, secara tertulis, oleh Pemilik Kebijakan Global.

Karyawan yang mengelola agen, kontraktor, atau Mitra Bisnis pihak ketiga lainnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dia memahami Kebijakan ini dan mengikutinya. Untuk membantu Anda mengomunikasikan persyaratan ini, berikan salinan kebijakan ini kepada Mitra Bisnis.

## **LATAR BELAKANG**

Korupsi melanggar kepercayaan publik, mengancam pembangunan ekonomi dan sosial, dan secara substansial menghambat perdagangan yang adil. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip Perusahaan Kraft Heinz, yang mewajibkan karyawan dan Perwakilan Komersialnya untuk secara ketat mematuhi kebijakan ini, Kode Etik perusahaan, dan semua persyaratan hukum yang berlaku terkait dengan suap, korupsi, dan pembayaran yang tidak pantas di setiap yurisdiksi tempat Kraft Heinz menjalankan bisnis.

Undang-undang antisuap/antikorupsi yang berlaku untuk Kraft Heinz dan karyawannya umumnya memiliki cakupan dan penerapan yang luas. Undang-undang ini melarang siapa pun untuk menawarkan, menjanjikan, memberi, meminta, atau menerima secara langsung atau tidak langsung barang Pemerintah atau seseorang di sektor swasta untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau mengamankan beberapa "keuntungan yang tidak pantas" lainnya. Berdasarkan undang-undang ini, suap dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk uang tunai, hadiah, jamuan, perjalanan, sumbangan amal, atau bantuan yang diberikan (misalnya, mendapatkan pekerjaan di Perusahaan untuk anak Pejabat Pemerintah).

Beberapa undang-undang ini, seperti Undang-Undang Praktik Korupsi Asing U.S. dan Undang-Undang Penyipuan Inggris 2010 memiliki jangkauan di luar wilayah dan mungkin berlaku untuk aktivitas yang dilakukan di luar U.S. atau UK. Dalam keadaan di mana hukum yang berlaku lebih ketat daripada Kebijakan ini atau kebijakan lokal lain yang berlaku, rekan kerja harus mematuhi hukum yang berlaku.

## **DEFINISI**

Judul: **Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi**

Pemilik Kebijakan:

Judul: **Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi**

Pemilik Kebijakan:

Judul: **Kebijakan Global Antisuap/Antikorups**

Judul: <b>Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi</b>	Pemilik Kebijakan: <b>Direktur Etika dan Kepatuhan</b>
Tanggal Diterbitkan: <b>27 Juli 2021</b>	Tanggal berlaku: <b>1 Agustus 2021</b>
Menggantikan:	<b>Kebijakan Anti-Korupsi Global</b> Kraft Heinz, Tanggal 1 Oktober 2015
	Kebijakan Antisuap Heinz CC.07 Tanggal: 11 Oktober 2011
	Kebijakan Melawan Korupsi dan Suap Kraft C-17 Tanggal: 1 Oktober 2012

untuk memperoleh bisnis secara tidak pantas atau memengaruhi keputusan bisnis secara korup.

Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan diperlakukan secara serius dan akan dikenakan tindakan kedisiplinan, hingga dan mencakup pemutusan hubungan kerja, dan jika perlu, rujukan ke lembaga penegak hukum yang sesuai.

Tidak ada orang yang tunduk pada Kebijakan ini yang akan dikenakan disiplin atau konsekuensi merugikan lainnya karena menolak membayar Suap atau melaporkan permintaan Suap kepada manajemen, bahkan jika tindakan karyawan tersebut mengakibatkan Perusahaan kehilangan bisnis. Karyawan harus melaporkan setiap permintaan Suap kepada atasannya, *Compliance Officer*, atau melalui saluran pelaporan Etika & Kepatuhan.

#### B. Pembayaran Fasilitas Dilarang

Hukum di sebagian besar negara, termasuk UK, tidak mengizinkan pembayaran fasilitas. Oleh karena itu, Perusahaan melarang keras Pembayaran Fasilitas. Konsultasikan dengan *Compliance Officer* jika Anda menerima permintaan pembayaran Fasilitas atau uang

Misalnya, Asisten Manajer

petugas di kantor pajak pemerintah untuk membeli formulir pajak. Tanpa membayar tip seperti itu, ia mungkin akan diberi tahu "kami kehabisan formulir hari ini." Pembayaran fasilitas dilarang oleh Kebijakan ini. Karyawan Kraft Heinz harus memberi tahu penyelia panitera bahwa kebijakan Perusahaan melarang pembayaran dan segera memberi tahu Petugas Kepatuhan.

Pembayaran fasilitas tidak termasuk kasus di mana lembaga pemerintah dapat mengenakan biaya resmi yang dapat dibayarkan langsung atas nama badan pemerintah atau perusahaan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam daftar biaya yang dipublikasikan atau dokumen resmi lainnya. Biaya resmi pemerintah ini dapat dibayarkan untuk mempercepat pembuatan paspor, lisensi, atau layanan lainnya, asalkan disetorkan ke kas pemerintah, kuitansi resmi pemerintah dikumpulkan, dan pengeluarannya dicatat secara akurat dalam pembukuan Perusahaan. Namun demikian, Pembayaran Fasilitas yang diberikan untuk kepentingan Pejabat Pemerintah dalam kapasitas pribadinya (yaitu, tidak disimpan dalam rekening perbendaharaan resmi milik pemerintah) akan melanggar Kebijakan ini.

#### C. Pembayaran untuk Kepentingan Pejabat Pemerintah



Judul: <b>Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi</b>	Pemilik Kebijakan: <b>Direktur Etika dan Kepatuhan</b>
Tanggal Diterbitkan: <b>27 Juli 2021</b>	Tanggal berlaku: <b>1 Agustus 2021</b>
Menggantikan:	<b>Kebijakan Anti-Korupsi Global</b> Kraft Heinz, Tanggal 1 Oktober 2015
	Kebijakan Antisuap Heinz CC.07 Tanggal: 11 Oktober 2011
	Kebijakan Melawan Korupsi dan Suap Kraft C-17 Tanggal: 1 Oktober 2012

Dalam keadaan tertentu, hadiah, jamuan, dan perjalanan untuk kepentingan Pejabat Pemerintah dapat diizinkan. Harus ada tujuan bisnis yang sah (misalnya, untuk memajukan niat baik atau untuk mempromosikan, mendemonstrasikan, atau menjelaskan produk dan layanan Kraft Heinz) dan pembayaran harus memenuhi persyaratan berikut:

Pembayaran **tidak** boleh disediakan atau ditawarkan untuk memengaruhi tindakan atau keputusan resmi secara tidak pantas untuk mengamankan keuntungan komersial yang tidak pantas



Judul: <b>Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi</b>	Pemilik Kebijakan: <b>Direktur Etika dan Kepatuhan</b>
Tanggal Diterbitkan: <b>27 Juli 2021</b>	Tanggal berlaku: <b>1 Agustus 2021</b>
Menggantikan:	<b>Kebijakan Anti-Korupsi Global</b> Kraft Heinz, Tanggal 1 Oktober 2015
	Kebijakan Antisuap Heinz CC.07 Tanggal: 11 Oktober 2011
	Kebijakan Melawan Korupsi dan Suap Kraft C-17 Tanggal: 1 Oktober 2012

menyimpan catatan komunikasi ini, termasuk perjanjian apa pun yang harus dipatuhi oleh Mitra Bisnis, dan uji kelayakan apa pun yang dilakukan.

## 2. *Persyaratan Uji Kelayakan Pihak Ketiga*

Semua unit bisnis bertanggung jawab untuk melakukan, dengan berkoordinasi dengan tim Etika dan Kepatuhan Global, prosedur uji kelayakan untuk Mitra Bisnis sehingga Perusahaan dapat yakin bahwa Mitra Bisnis tidak mungkin terlibat dalam kegiatan korupsi. Uji kelayakan dilakukan baik pada Mitra Usaha baru maupun secara berkala pada Mitra Usaha yang sudah ada.

Unit bisnis harus berkonsultasi dengan tim Etika & Kepatuhan Global tentang uji kelayakan sebelum melibatkan Mitra Bisnis mana pun yang dapat meningkatkan risiko korupsi di Kraft Heinz. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, Mitra Bisnis yang:

- mungkin berinteraksi dengan Pemerintah atau Pejabat Pemerintah atas nama Perusahaan; atau
- meminta pembayaran dilakukan ke rekening bank atau badan yang tidak terafiliasi dengan Mitra Bisnis; atau
- tampak enggan atau menolak untuk memberikan jaminan bahwa ia akan mematuhi undang-undang antikorupsi dan antisuap yang berlaku.

Beberapa contoh interaksi Mitra Bisnis dengan Pemerintah atau Pejabat Pemerintah termasuk, namun tidak terbatas pada:

1. memperoleh izin atau sertifikasi Pemerintah atas nama Perusahaan;
2. kliring produk Kraft Heinz melalui Bea Cukai atas nama Perusahaan;
3. memperoleh persetujuan pemerintah atas nama Perusahaan untuk mengimpor dan/atau mendistribusikan produk Kraft Heinz; atau
4. menjual atas nama Perusahaan kepada Pemerintah, instansi Pemerintah atau badan usaha milik Pemerintah.

Informasi terperinci tentang prosedur Uji Kelayakan Kraft Heinz dijelaskan sepenuhnya dalam Kebijakan Uji Kelayakan Pihak Ketiga Global Kraft Heinz dan Pedoman Uji Kelayakan yang dikelola oleh Etika dan Kepatuhan. Hubungi *Compliance Officer* setempat untuk informasi lebih lanjut tentang persyaratan uji kelayakan untuk situasi khusus Anda.

## 3. *Mitra Bisnis Pihak Ketiga* Red Flag





Judul: **Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi**

Pemilik Kebijakan:

Judul: <b>Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi</b>	Pemilik Kebijakan: <b>Direktur Etika dan Kepatuhan</b>
Tanggal Diterbitkan: <b>27 Juli 2021</b>	Tanggal berlaku: <b>1 Agustus 2021</b>
Menggantikan:	<b>Kebijakan Anti-Korupsi Global</b> Kraft Heinz, Tanggal 1 Oktober 2015
	Kebijakan Antisuap Heinz CC.07      Tanggal: 11 Oktober 2011
	Kebijakan Melawan Korupsi dan Suap Kraft C-17      Tanggal: 1 Oktober 2012

Judul: <b>Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi</b>	Pemilik Kebijakan: <b>Direktur Etika dan Kepatuhan</b>
Tanggal Diterbitkan: <b>27 Juli 2021</b>	Tanggal berlaku: <b>1 Agustus 2021</b>
Menggantikan:	<b>Kebijakan Anti-Korupsi Global</b> Kraft Heinz, Tanggal 1 Oktober 2015
	Kebijakan Antisuap Heinz CC.07 Tanggal: 11 Oktober 2011
	Kebijakan Melawan Korupsi dan Suap Kraft C-17 Tanggal: 1 Oktober 2012